

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Gery Dikri Christian Sitompul, 1510111079, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satuan lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 adalah segala hal/ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), kepolisian melaksanakan tugasnya melalui Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat. Pembalakan liar (*illegal logging*) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 5 yaitu tindak pidana yang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Banyaknya tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan suatu permasalahan penting di Kabupaten Pasaman Barat: Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Pasaman Barat? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Pasaman Barat? 3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Pasaman Barat? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala keterbatasan jumlah aparat penegak hukum khususnya penyidik yang berjumlah 2 (dua) orang sedangkan Luas wilayah dan kawasan hutan di Kabupaten Pasaman Barat lebih kurang mencapai 30.000 hektare, dalam melakukan penyidikan fasilitas dan prasarana aparat penegak hukum mengalami kesulitan karena minimnya jumlah sarana dan prasarana serta kurangnya kordinasi masyarakat setempat dengan aparat penegak hukum. Namun pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat berupaya mengatasi kendala tersebut dengan melakukan pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat serta melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan jumlah penyidik dan memberikan sanksi berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: *Pembalakan Liar, Penyidikan, Kepolisian*